

**PEMAGANGAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI
KEMISKINAN EKSTRIM PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN MOBILITAS
PENDUDUK ACEH**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**DIRVA QADRI
NIM. 190802018**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dirva Qadri
NIM : 190802018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe 21 Desember 2001
Alamat : Desa Lamglumpang, Kecamatan
Ulee kareng, Banda Aceh

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan plagiasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian bahwa yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 27 Oktober 2023

Peneliti,



DIRVA QADRI
NIM 190802018

**PROGRAM PEMAGANGAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI
KEMISKINAN EKSTRIM PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS
PENDUDUK ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Pada Program Studi Administrasi Negara

Oleh :

**DIRVA QADRI
NIM. 190802018**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi
Administrasi Negara

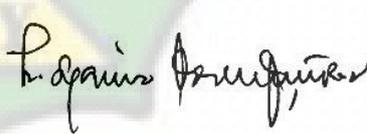
Disetujui untuk dimunasqasyahkan oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Said Amirulkamar, MM., MSi

NIP 196110051982031007


Hijrah Saputra. S.Fil.I., M.Sos

NIP 1990072122020121016

PENGESAHAN SIDANG

**PEMAGANGAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI
KEMISKINAN EKSTRIM PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
MOBILITAS PENDUDUK ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari / Tanggal : 18 Desember 2023

Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

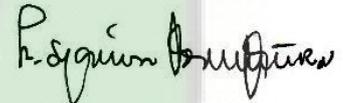
KETUA



Dr. Said Amirulkamar, MM., MSi

NIP 196110051982031007

SEKRETARIS



Hijrah Saputra. S.Fil.L., M.Sos

NIP 1990072122020121016

PENGUJI I



Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.

NIP 2017117904

PENGUJI II



Safwan, S.E., M.Si

NIP 1990072122020121016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2021 menyebutkan Provinsi Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera, salah satu penyebab kemiskinan ialah pengangguran. Pemerintah Aceh berinisiatif meningkatkan program akselerasi untuk proses penyerapan tenaga kerja skill melalui program pemagangan dalam negeri dan *workplace training* yang ditempatkan perusahaan mitra kerjasama Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh selama 3-5 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penghambat pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan besaran persentase perekrutan tenaga kerja skill setelah pelaksanaan program pemagangan dalam negeri dan *workplace training* sebesar 68% pada tahun 2020, 78% pada tahun 2021 dan 82% pada tahun 2022. Besaran persentase ini dapat dikategorikan program pemagangan berjalan secara efektif dikarenakan jumlah peserta magang yang terserap di dunia kerja meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci : Pemagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Kemiskinan, Provinsi Aceh

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “PEMAGANGAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN EKSTRIM PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH”. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) pada program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan, Uin Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc.Sc selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Muazzinah M.P.A., Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
5. Terima kasih kepada Dr. Sayed Amirulkamar, MM.,MSi selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mendidik, memberi saran dan motivasi.
6. Terima kasih kepada Hijrah Saputra. S.Fil.I., M.Sos_selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mendidik, memberi saran dan motivasi.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan dan juga

seluruh staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu peneliti dalam kelancaran penelitian proposal skripsi ini.

8. Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua yang telah mengasuh, mendidik, membina, membimbing, serta selalu mendoakan peneliti sehingga dapat memberikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga jerih payah dan ketulusan orang tua kami mendapat balasan setimpal disisi Allah SWT.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang dimiliki. Peneliti mengharap kritikan dan saran demi kesempurnaan proposal ini sehingga bisa bermanfaat kepada semua orang.

Banda Aceh, 27 Oktober 2023
Peneliti,

Dirva Qadri
NIM. 190802018



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Teori Pemagangan.....	6
2.1.2 Teori Pengangguran	7
2.1.3 Teori tenaga kerja.....	9
2.1.4 Teori ekstrim	10
2.1.5 Teori program.....	11
2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	12
2.3 Kerangka Berfikir.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Pendekatan Penelitian	16
3.2 Fokus Penelitian.....	17
3.3 Lokasi Penelitian.....	18
3.4 Jenis Dan Sumber Data	18
3.5 Informan Penelitian.....	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	23
4.1 Hasil Penelitian	23
4.1.1 Gambaran Umum.....	25
4.1.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	25

4.1.1.2 Struktur Organisasi.....	26
4.2 Pelaksanaan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.....	26
4.2.1 Koordinasi Bersama Dunia Usaha Dan Dunia Industri	26
4.2.1.1 Musyawarah	26
4.2.1.2 Dudi (Dunia Usaha Dan Dunia Industri) Dan Peserta Magang Membuat Perjanjian Bersama...	28
4.2.2 Kolaborasi	30
4.2.2.1 Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Koordinasi Bersama Fkjp.....	30
4.2.2.2 Komunikasi	31
4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemagangan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	32
4.3.1 Internal	32
4.3.1.1 Rendah Melibatkan Pengusaha / Perusahaan (Dudi).....	32
4.3.1.2 Pelatihan Yang Dilakukan kurang Melibatkan Institusi DUDI.....	36
4.3.2 External	37
4.3.2.1 Rekrutmen Peserta Magang	37
4.3.2.2 Diskriminasi.....	47
4.4 Pembahasan	49
4.4.1 Pelaksanaan Pemagangan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.....	49
4.4.1.1 Koordinasi Bersama DUDI.....	49
4.4.1.2 Kolaborasi	50
4.4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemagangan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	51
4.4.2.1 Internal	51
4.4.2.2 External.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi Dan Indikator Pelaksana Pemagangan	17
Tabel 3.2 Faktor Penghambat Pemagangan	17
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Data Jumlah Mitra.....	45
Tabel 4.2 Data Jumlah Peserta Magang	46
Tabel 4.3 Data Serapan Dalam Dunia Kerja.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	26
Gambar 4.2 <i>log book</i> peserta pemagangan	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP	60
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	61
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	62
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	63
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama dihadapi oleh sebagian besar negara berkembang di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap penduduk Indonesia memerlukan pekerjaan, jumlah penduduk yang besar juga memerlukan lapangan kerja yang besar. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warganya.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Garis kemiskinan perkapita makanan di provinsi Aceh sebesar Rp 468.000 perkapita perbulan pada tahun 2022. Menurut data kementerian keuangan, realisasi penerimaan Aceh mencapai 13,95 triliun pada 2021.¹ Realisasi pendapatan di Aceh menempati urutan keenam se-Indonesia. Kesejahteraan warga Aceh idealnya harus lebih baik dari provinsi lain dengan anggaran yang lebih besar jika Aceh memiliki anggaran yang besar. Namun faktanya tidak selalu seperti yang terlihat di atas kertas. Tergantung bagaimana pengelolaannya dan kondisi lainnya, anggaran yang besar tidak dapat menjamin akan memberikan output berupa kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah

¹ [https://djpk.kemenkeu.go.id/portal /data/apbd/](https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd/) di akses pada tanggal 31 Agustus 2023

sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan orang-orang di pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar dalam memerangi kemiskinan.²

Upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan semakin sulit. Lebih diperparah lagi, bahwa pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan secara *charity* atau berupa bantuan sosial. Akibatnya masyarakat semakin malas bekerja, pengangguran semakin meningkat, tidak mampu melakukan kompetisi, ketergantungan pada pihak lain semakin meningkat, sehingga kemandirian dan kesejahteraan sulit diwujudkan.

Orang yang mengalami kemiskinan mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Ini dapat mengakibatkan kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan yang baik, dapat menyebabkan pengangguran. terbukti bahwa banyak perusahaan cenderung memakai tenaga kerja di luar Aceh. dan juga akibat pengangguran di Aceh yaitu pelatihan yang di lakukan institusi pelaksana masih rendah melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sehingga ketergantungan dengan daerah luar sangat tinggi. Kondisi yang di harapkan adalah tenaga kerja Aceh harus mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar dan terlaksananya proses pelatihan vokasi yang berbasis pasar kerja dengan melibatkan unsur (DUDI).³

² Jurnal Ilmu Ekonomi et al., "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI ACEH," *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 10, no. 1 (2015): 37.

³ Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Acehmobduk Aceh, tahun (2019)

Pemerintah Aceh mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan ini, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Salah satu jalan keluar atas permasalahan ini ialah melalui program magang yang bekerja sama dengan DUDI (dunia usaha & dunia industri) yang tersebar di kabupaten / kota provinsi Aceh. Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja, Dilaksanakan secara langsung dan/atau dalam proses produksi komoditas di tempat kerja, di bawah arahan dan pengawasan seorang pelatih, atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman untuk menguasai kemampuan kerja tertentu. Magang adalah konsep belajar, dan kerja (*learning by doing*) bagi peserta melalui Program Magang ini berjalan selama 3 – 5 bulan, peserta magang akan mendapatkan pengalaman kerja di dunia kerja, hal ini meliputi keterampilan, sikap mental, etos kerja, Perilaku industri dan budaya kerja. ini menjadi sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja mandiri.⁴

Masalah yang di hadapi ketika program magang di jalankan adalah pola rekrutmen pemagangan belum terbuka dan masih belum bisa di akses oleh semua pihak bagi yang membutuhkan. dan pemagangan yang di lakukan masih rendah dalam melibatkan pengusaha atau perusahaan (DUDI).⁵ Serta sarana dan prasana pelatihan vokasi masih terbatas.

1.2 Identifikasi masalah

Jadi dari latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa identifikasi masalahnya sebagai berikut :

⁴ Erwin Ferdinansyah, Erwin Ferdinansyah, “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri - Dekon 2022,” 2022.

⁵ Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Acehmobduk.Aceh, tahun (2019)

1. Tingginya tingkat pengangguran di Aceh serta rendahnya kualitas tenaga kerja di Aceh.
2. Kurangnya peluang kerja serta tidak seimbangnya jumlah lowongan yang tersedia dengan jumlah masyarakat yang ingin melamar. Pekerjaan

1.3 Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam mengurangi kemiskinan ekstrim ?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam mengurangi kemiskinan ekstrim?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
2. Untuk mengetahui penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam mengurangi kemiskinan ekstrim

1.5 Manfaat penelitian

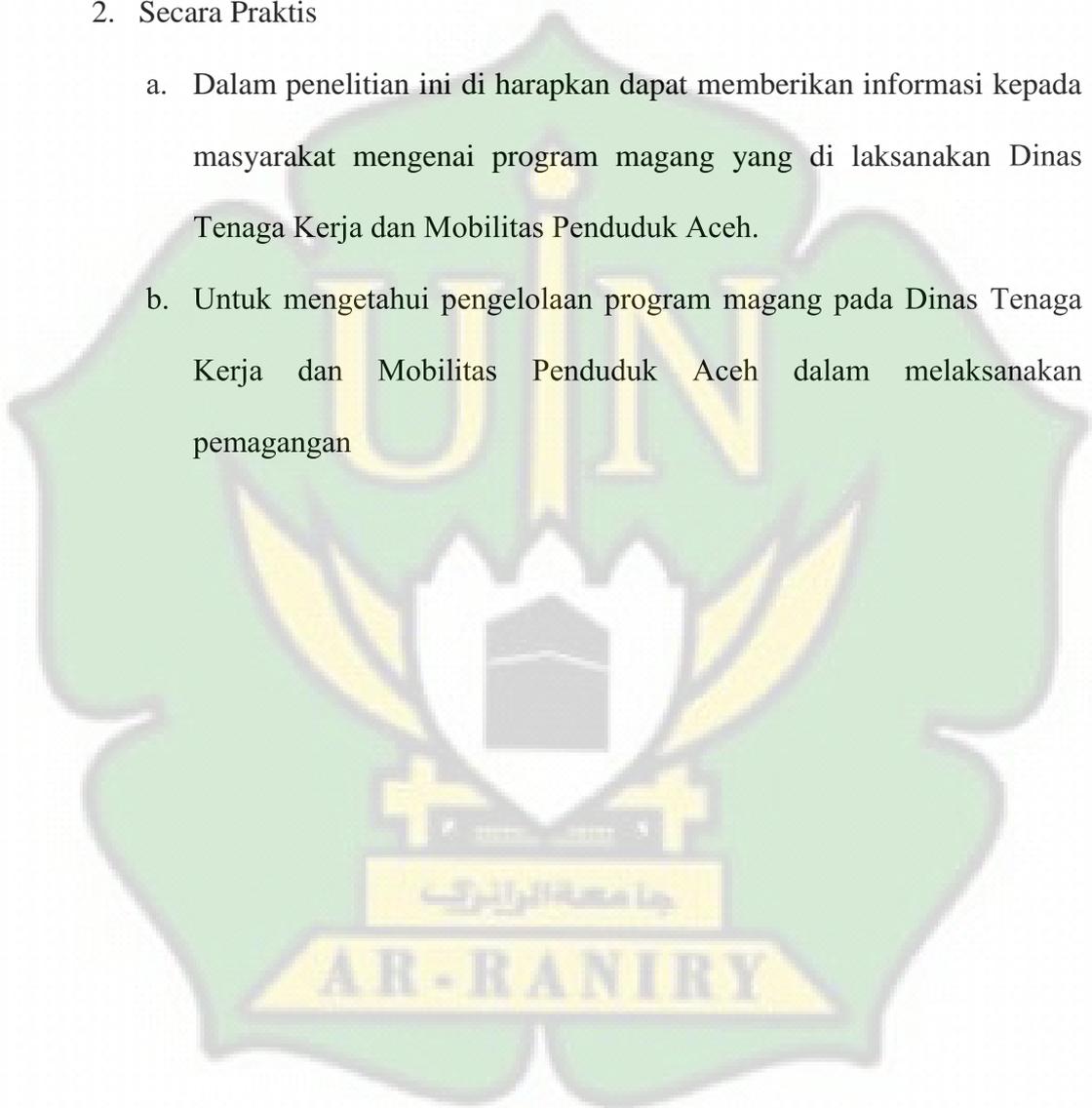
Adapun kegunaan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk megembangkan ilmu Administrasi Publik khususnya yang menyangkut dengan pemagangan dan hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan kita

- b. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka program pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

2. Secara Praktis

- a. Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program magang yang di laksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan program magang pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam melaksanakan pemagangan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori Pemagangan

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka (11) tentang Ketenagakerjaan, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”⁶ Pemagangan dilakukan dengan perjanjian tertulis antara peserta magang dan perusahaan. Dalam hal pemagangan dilakukan tidak melalui perjanjian pemagangan, maka pemagangan tersebut dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.⁷

Pemagangan menjadi peran yang penting karena di dalam pemagangan terdapat tujuan yaitu mempromosikan formasi pembelajaran dan keterampilan, serta memfasilitasi tenaga kerja dengan menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia kerja juga pemagangan dapat membantu perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan menyediakan pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi dunia kerja. Manfaat yang didapatkan dalam pelaksanaan pemagangan juga tidak hanya dirasakan pihak perusahaan yang dapat menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan standar industri

⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

⁷ Pasal 22 Undang-undang Ketenagakerjaan

dan kebutuhan perusahaan, namun juga pihak dari pemegang itu sendiri mendapatkan kesempatan untuk menerima pelatihan, bukan hanya untuk mengasah keterampilan yang sesuai dengan standar industri/perusahaan, namun juga untuk mendapatkan secara langsung pelatihan secara teknikal dan keterampilan kerja inti yang dapat meningkatkan kinerja mereka.

2.1.2 Teori pengangguran

2.1.2.1 Pengertian pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya.”⁸

Menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi

⁸ Badan Pusat Statistik. 2017. *Konsep Tenaga Kerja*.

kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan.

2.1.2.2 Penyebab Pengangguran

Pengangguran dapat disebabkan oleh hal – hal yang bersifat alamiah atau budaya maupun hal – hal yang bersifat non alamiah atau structural. Penyebab pengangguran yang pertama *individual explanation* yaitu pengangguran disebabkan oleh karakteristik orang itu sendiri di antaranya malas, kualitas SDM rendah, lapangan kerja sempit dan sebagainya.

Penyebab pengangguran di dasari oleh beberapa keadaan yaitu :

a. Pendidikan tidak memadai

Seseorang dengan Pendidikan yang rendah cenderung tidak mempunyai keterampilan hidup secara spesifik. Kemampuan memasuki dunia kerja terhambat oleh Pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Karena dia tidak berdaya dalam hal ini.⁹

b. Malas bekerja

Kemalasan menjadi masalah yang harus di tanggapi dengan serius. Seseorang yang memiliki mentalitas ini tidak tertarik dan tidak mau bekerja. Atau membiarkan takdir mengendalikan hidupnya secara pasif.

⁹ Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) Hal.344

Sikap malas ini seringkali bergantung pada orang lain, baik itu kerabat atau orang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhannya.

c. Ketenagakerjaan

Masalah ketenaga kerjaan adalah salah satu yang lazim di masyarakat kita dan lingkungan terdekat. Pengangguran pertama kali muncul sebagian akibat dari rendahnya SDM dan lapangan kerja yang sempit menyebabkan tingginya tingkat pengangguran.

2.1.2.2 Dampak Pengangguran

Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, pengangguran juga dapat menimbulkan ketidakstabilan social politik. Dampak sosial akibat pengangguran, diantaranya yaitu: Terganggunya stabilitas sosial – politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan demonstrasi. Meningkatnya kriminalitas, seperti pencurian atau pun perampokan.

2.1.3 Teori tenaga kerja

tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi

barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (2008) dan sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.¹⁰

2.1.4 Teori Ekstrim

Ekstrim adalah kondisi dimana, suatu kondisi teramati melebihi batas tertentu. Pengangguran ekstrim adalah ketidakmampuan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Faktor kemiskinan ekstrim adalah rendahnya kualitas SDM dan sempitnya masalah pekerjaan. Kepala Dinas Sosial Palangkaraya, H Riduan mengatakan, seseorang dikategorikan miskin ekstrim jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739/ orang / hari atau 322.17/orang/ bulan.

2.1.5 Teori program

Program adalah pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai sasaran yang sama. Muhaimin mendefinisikan Biasanya suatu program mencakup seluruh

¹⁰ UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran – sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi. Yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan.

Solichin mengklaim bahwa program merupakan kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk serangkaian mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.6 Teori Kemsikinan

2.1.6.1 Pengertian Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan pendapatan individu untuk menutupi kebutuhan dasar mereka, yang membuat kecil kemungkinan mereka untuk bertahan hidup.¹¹ Memiliki sumber daya yang tidak mencukupi untuk bertahan hidup, seperti uang dan harta benda, terkadang didefinisikan sebagai kemiskinan.

Prof. Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang.¹² Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan dicirikan sebagai keadaan dimana seseorang kekurangan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesejahteraan ekonomi, social, Psikologi, dan spiritual.¹³

Definisi kemiskinan menurut BPS adalah “kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per

¹¹ Agus Haryadi, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta Prenamedia Group, 2015, hal. 49

¹² Abu Ahmadi, *Ilmu sosial Dasar*, (Jakarta : Rineka Cipta,2009), hal.344

¹³ Irfan Syaki Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal,69

kapita per hari” Sedangkan definisi kemiskinan menurut BKKBN (2003) adalah “tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, seluruh anggota keluarga: tidak mampu makan dua kali sehari, seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan”, World Bank, juga mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: “kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 2,00 per hari(1US\$ = Rp. 10.000,00)” Selanjutnya, Bappenas mendefinisikan kemiskinan adalah “kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”

2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

1. Peneliti pertama oleh *Muhammad Zulfadhli*.¹⁴ Tahun 2016 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Universitas Mulawarman yang berjudul Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Di Kota Samarinda Terlibat dalam pekerjaan penempatan sumber daya manusia di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini Menunjukkan peran Kementerian Tenaga Kerja dalam penempatan tenaga kerja Di Kota Samarinda, masih banyak calon tenaga kerja yang belum terdaftar memiliki keterampilan kerja dan kurang tertarik pada lowongan yang ada, Minimnya lowongan pekerjaan, masih sedikitnya informasi pasar kerja yang tersedia Belum

¹⁴ Muhammad Zulfadhli. 2016. Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Di KotaSamarinda. eJournal Administrasi Negara. Volume 4, Nomor 1

optimal, masih belum maksimal pengetahuan tentang antar mekanisme Pekerjaan oleh perusahaan dan pencari kerja dalam penempatan tenaga kerja, dan kurangnya pemahaman tentang agen penempatan tenaga kerja. Berdasarkan peneliti terdahulu yang pertama terdapat persamaan yaitu sama – sama membahas tentang tenaga kerja. Terdapat perbedaan pada penelitian ini ialah lokasi penelitian sehingga membedakan hasil penelitian itu sendiri.

2. Peneliti kedua *Azni Afriyulaniza*. tahun 2019 dengan jenis penelitian kualitatif di IAIN Bengkulu. Yang berlokasi di Bengkulu dengan judul “Pengaruh Pengalaman Praktek Magang Industri Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Perbankan Syariah Institut Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman praktik penempatan industri terhadap kesiapan kerja mahasiswa di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Toha Bandung Bengkulu. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman magang industri berdampak positif pada dan berimplikasi signifikan terhadap penyiapan kerja mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Persamaan pada penelitian *Azni Afriyulaniza* memiliki kesamaan yaitu membahas tentang praktek magang dan terdapat perbedaan pada penelitian ini mengenai lokasi dan sehingga membedakan hasil penelitian itu sendiri.

3. Peneliti ketiga *Nur Aini Sitepu* tahun 2020 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian tersebut berlokasi di Kota Medan dengan judul *Efektivitas Program Pemagangan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan* . yang hasil penelitian Sasaran program pemagangan sesuai dengan tujuan dari program pemagangan dan visi misi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan kualitas calon tenaga kerja tentu saja sasaran yang layak untuk program pemagangan ini merupakan masyarakat dengan usia produktif yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dan juga persamaannya yaitu membahas tentang praktek magang. Perbedaan dari peneliti ketiga adalah mengenai lokasi dan fokus penelitian sehingga membedakan hasil dari penelitian itu sendiri.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan sedalam dalamnya.”¹⁵

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.¹⁶ Hasil dari penelitian ini membutuhkan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini juga bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan obeservasi. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu Efektivitas Program Magang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dalam Mengurangi Pengangguran di Aceh. peneliti menggunakan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks dan kompleksitar fenomena yang dipelajari. Ini dapat mencakup pemahaman tentang bagaimana orang mengalami, memberikan makna, dan merespons suatu situasi.

¹⁵ Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Riset Komunikasi. Prenada. Jakarta.

¹⁶ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung. (Hal 14)

3.2 Fokus penelitian

1. pemagangan masyarakat dalam mengurangi pengangguran ekstrim pada dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk aceh.

Tabel 3.1

Dimensi dan indikator pelaksana pemagangan

No.	Dimensi	Indikator
1.	koordinasi Bersama dunia usaha dan dunia industri.	a. Musyawarah b. DUDI (dunia usaha dan dunia industri) dan peserta magang membuat perjanjian bersama.
2.	Kolaborasi	a. Kerjasama FKJP b. Komunikasi

2. faktor penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat yang di hadapi pelaksana pemagangan

No.	Dimensi	Indikator
1.	External	a. Pola rekrutmen b. banyak perusahaan menggunakan tenaga kerja luar aceh
2.	Internal	a. pelatihan b. keterlibatan perusahaan

3.3 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aceh khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Alasan peneliti dalam pemilihan objek karena peneliti masih melihat minimnya lowongan kerja di Aceh, dan masih banyak perusahaan cenderung menggunakan tenaga kerja di luar Aceh. Jadi fokus yang ingin dilihat adalah bagaimana peran masing-masing bidang yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh terkait masalah ketenagakerjaan, bagaimana koordinasi masing-masing bidang dan terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada.

3.4 Jenis dan Sumber Data

A. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan narasumber menggunakan alat untuk membantu penelitian di antaranya alat tulis dan alat perekam,¹⁷

B. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya dan sumber-sumber data yang telah ada.¹⁸ Selain itu diperoleh dari studi kepustakaan

¹⁷ Akhmad Musyafak. 2015. Mapping Agroekonomisistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang- Serawak Kalimantan Barat. (Yogyakarta: Deepublish,), hlm. 7.

¹⁸ M. Iqbal Hasan. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia : Indonesia Bogo

yang berupa buku, artikel, jurnal, Peraturan Gubernur Provinsi Aceh serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Efektivitas Program Magang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Dalam Mengurangi Pengangguran di Aceh.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja	2 orang
3.	Kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas	1 orang
4.	Kepala seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1 orang
5.	Pengusaha	1 orang
6.	Peserta Magang	2 orang
JUMLAH		7 Orang

Sumber : Data di olah pada tahun 2023

3.6 Teknik pengumpulan data

A. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data – data berupa dokumen – dokumen yang ada pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Peneliti mengumpulkan data seperti jumlah perusahaan yang mengikuti program magang, jumlah peserta yang mengikuti program magang dan jumlah peserta magang yang sudah masuk ke dunia kerja.

B. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan maupun tulisan kepada informan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁰

¹⁹ Sarwono, Jonathan. 2010. Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah. Yogyakarta: CV Andi Offset. Hlm. 34-35

²⁰ M. Iqbal Hasan. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia : Indonesia Bogor

C. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian psikologis, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks alamiah. observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Supaya data akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.²¹ Dalam observasi ini peneliti melihat langsung bagaimana situasi yang terjadi di lapangan dengan mengamati dan mencatat kejadian – kejadian yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan di Kawasan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan Aula SMK 1 Kota Banda Aceh.

3.7 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini diverifikasi dengan menggunakan berbagai pendekatan. Namun peneliti tidak menggunakan metode yang sesuai untuk pengaturan penelitian.

Teknik yang digunakan peneliti untuk memverifikasi kebenaran data saat berbagi pekerjaan adalah sebagai berikut :

²¹ Poerwandari, E.K. (2017). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Depok: LPSP3 UI.

1. Ketekunan pengamatan

Dengan tujuan mengidentifikasi ciri – ciri tersebut, pengamatan terus – menerus dilakukan terhadap faktor faktor tersebut dalam konteks yang berkaitan dengan masalah dan masalah yang di cari, sebelum benar – benar puas dengan hal tersebut.²²

2. Triangulasi

Validasi keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yang menggunakan metode lain. Dalam penelitian ini, tidak cukup hanya mengandalkan data dari hasil penelitian lapangan, sumber tambahan dari luar, seperti buku, catatan, dan lain sebagainya. Juga harus di perhatikan.

²² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) hal.329

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Gambaran umum

4.1.1.1 Deskripsi lokasi penelitian

a. Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, merupakan organisasi Perangkat Daerah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Aceh, yang mana pemerintah Aceh adalah pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Dalam Pembentukan dan susunan perangkat Aceh yang mana Satuan Kerja Perangkat Aceh disebut dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh yang salah satunya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Salah satunya bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja merupakan unsur pelaksana teknis pelaksana pelatihan kerja dan pemempatan tenaga kerja.

b. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

1. Visi

Terwujudkan Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang produktif maju, mandiri dan sejahtera

2. Misi

- a. Menciptakan Tenaga Kerja yang terampil produktif dan mempunyai kompeten kerja.
 - b. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - c. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.
 - d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Transmigrasi dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota.
 - e. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
 - f. Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa maju dan mandiri
- c. Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

1. Tugas

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh secara umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan.

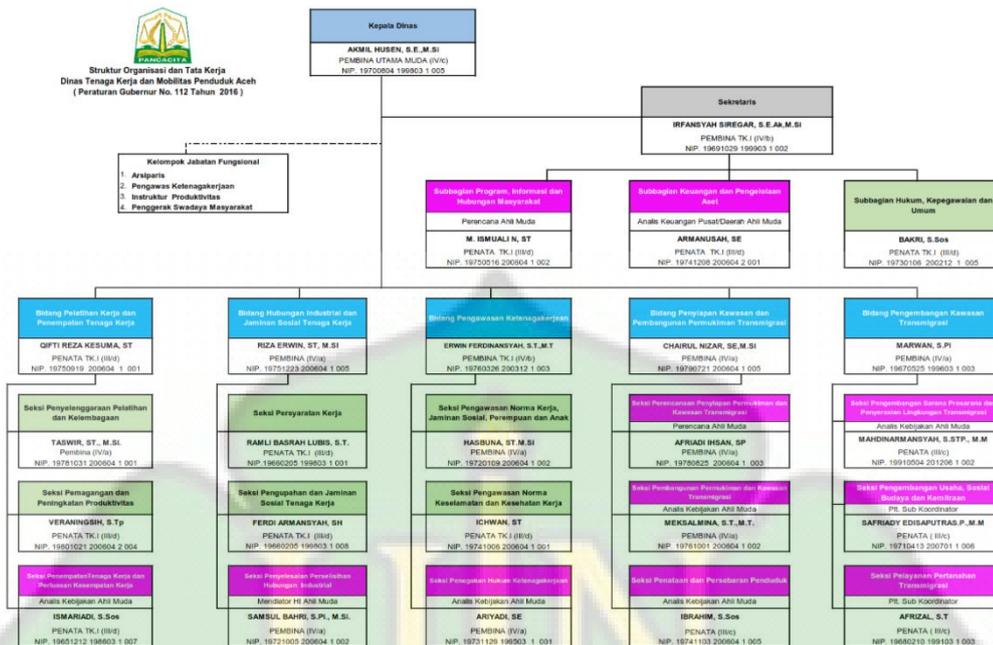
2. Fungsi

- a. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.
- d. Penyelenggaraan Administrasi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasi.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Pada dasarnya setiap organisasi pemerintah maupun swastanisasi memiliki jenjang kendali terhadap pelaksanaan

tugas yang di emban masing – masing bidang kepekerjaan yang di emban sebagai tanggung jawab personal sesuai dengan koridor yang berlaku sebagaimana peraturan gubernur Aceh 112 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk Aceh. hal ini dapat dilihat sebagaimana gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 : Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
Tahun 2023

4.2 Pelaksanaan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

4.2.1 Koordinasi Bersama Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)

4.2.1.1 Musyawarah

Dalam koordinasi Bersama Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) pada dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk aceh terhadap koordinasi yang di bangun Bersama dilakukan melalui musyawarah berkenaan dengan Program pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri adalah salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat pencari kerja yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kondisi rill ini disatu sisi mencari pekerjaan disisi lain untuk menambah pendapatan serta ingin mengembangkan kualitas sumber daya

individual agar dapat memperoleh keterampilan yang mampu bersaing di dunia kerja dan mampu membuka usaha sendiri (mandiri). Program pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh berkoordinasi Bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sebelum melaksanakan program magang .

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala seksi pemagangan dan produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, berkenaan dengan koordinasi bersama dunia usaha dan dunia industri pemagangan menyebutkan sebagai berikut

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam membangun koordinasi bersama selalu dilakukan melalui musyawarah dengan DUDI agar adanya titik fokus sebelum menentukan perusahaan penyelenggara pemagangan, kami perlu penilaian tentang kelayakan perusahaan pelaksana pemagangan untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan penyelenggara tersebut mampu melaksanakan pemagangan sampai selesai²³⁾

Dari hasil wawancara diatas, kita mengetahui bahwa, tidak sembarang perusahaan yang bisa mengikuti program magang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, dikarenakan memiliki syarat – syarat

²³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas tanggal 18 Agustus 2023

tertentu untuk mengikuti program magang tersebut. Program magang tersebut di khusukan untuk perusahaan yang sudah memiliki kelayakan untuk mengikuti program magang untuk memastikan bahwa perusahaan mampu melaksanakan program magang sampai selesai.

Berdasarkan Analisa dokumen peneliti di lapangan terhadap musyawarah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mobduk terhadap pemagangan perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu, menunjukkan sebagai berikut.

Persyaratan bagi perusahaan penyelenggara pemagangan di Indonesia khususnya Aceh mengacu pada pasal 21, UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyebutkan sebagai berikut :

1. Perusahaan penyelenggara pemagangan mempunyai status badan hukum yang jelas sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku :
 - a. Mempunyai struktur organisasi
 - b. Telah beroperasi / memproduksi secara aktif sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun
 - c. Mempunyai sarana dan fasilitas sesuai dengan program pemagangan yang akan di laksanakan
 - d. Mempunyai karyawan yang memiliki kualifikasi kompetensi dan mampu bertindak sebagai instruktur, pembimbing atau supervisor peserta pemagangan.
2. Instruktur yang melaksanakan kegiatan pemagangan adalah seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Minimal Pendidikan SLTA dan pengalaman kerja 6 bulan
 - b. Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
 - c. Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan.

4.2.1.2 DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dan peserta magang membuat perjanjian bersama

Setelah calon peserta magang lulus seleksi, perusahaan menandatangani surat perjanjian pemagangan yang di ketahui dan di tandatangani oleh dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan.

Perjanjian pemagangan yang telah di tandatangani tersebut selanjutnya di daftarkan dan terregistrasi di dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan.

Mengacu pada pasal 21, Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

1. Tujuan perjanjian pemagangan

Dibuatnya perjanjian pemagangan antara perusahaan / industri dengan pemegang adalah :

- a) Tujuannya adalah sebagai dasar serta pedoman dalam mengatur hubungan timbal balik dan penentuan hak serta kewajiban, sehingga tercipta keserasian antara perusahaan/industri dan peserta pemagangan dalam pelaksanaan pemagangan.
- b) Tujuannya adalah sebagai dasar serta pedoman dalam mengatur hubungan timbal balik dan penentuan hak serta kewajiban, sehingga tercipta keserasian antara perusahaan/industri dan peserta pemagangan dalam pelaksanaan pemagangan.

2. Isi perjanjian pemagangan

Tujuannya adalah sebagai dasar serta pedoman dalam mengatur hubungan timbal balik dan penentuan hak serta kewajiban, sehingga tercipta keserasian antara perusahaan/industri dan peserta pemagangan dalam pelaksanaan pemagangan.

- a) Hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan kontrak antara perusahaan / industri dan pemegang
- b) Nama, jabatan dan alamat pihak perusahaan/industri yang akan menyelenggarakan pemagangan
- c) Nama, tempat, tanggal lahir dan alamat pemegang
- d) Penerimaan dan lokasi pemagangan
- e) Jangka waktu pemagangan
- f) Jenis program dan nama jabatan
- g) Hak dan kewajiban perusahaan/industri
- h) Hak dan kewajiban pemegang
- i) Sanksi – sanksi
- j) Lain – lain
- k) Penutup

4.2.2 Kolaborasi

4.2.2.1 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Koordinasi Bersama FKJP

Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) adalah forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan dari unsur-unsur perusahaan, pemerintah, asosiasi, LPK serta stakeholder lainnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan.²⁴ Dalam memaksimalkan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk memudahkan identifikasi kesempatan magang bagi pencari kerja atau calon tenaga kerja. Provinsi Aceh mengadakan pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP).

Hal ini sesuai dengan Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Pembentukan FKJP ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemagangan, meningkatkan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan lembaga pelatihan kerja dan memperkuat peran dan tanggung jawab pengusaha dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Bersama Kepala bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mengatakan bahwa :

pembentukan FKJP ini harapannya dapat meningkatkan peran serta perusahaan dalam program pemagangan, kemudian juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pencari

²⁴ Petunjuk teknis penyelenggaraan pemagangan dalam negeri dekon 2019

kerja, dan juga dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan maupun swasta.²⁵

Dari hasil wawancara tersebut, kita mengetahui bahwasanya FKJP ini juga berperan penting dalam menjalankan program magang, di bentuknya FKJP pada tingkat provinsi dan kabupaten / kota adalah sebagai penyeimbang kebijakan – kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemagangan khususnya pemagangan dalam negeri di perusahaan. Dengan adanya FKJP dapat terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dan perusahaan.

4.2.2.2 Komunikasi

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh membangun komunikasi yang baik dengan FKJP (Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan). FKJP berfungsi untuk memfasilitasi calon tenaga kerja yang akan ikut program permagangan di suatu perusahaan. dibentuknya FKJP merupakan langkah positif. Karena menurutnya dengan adanya FKJP, akan mempersiapkan calon tenaga kerja secara matang.

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh biasanya berhubungan dengan isu – isu ketenagakerjaan, pelatihan tenaga kerja, kebijakan ketenagakerjaan, dan masalah – masalah seputar tenaga kerja, FKJP merujuk kepada sebuah organisasi atau Lembaga yang terlobat dalam berbagai aspek ketenagakerjaan, pelatihan, atau kebijakan ketenagakerjaan, hubungan antara FKJP dan Dinas Tenaga Kerja dan

²⁵ wawancara dengan Kepala bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

Mobilitas Penduduk Aceh biasanya melibatkan FKJP yang dapat bekerjasama dalam menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di wilayah Aceh.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mengatakan bahwa :

FKJP Ini dapat memberikan data dan informasi yang relevan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Khususnya di bidang kita. Data yang di berikan FKJP ini juga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif. FKJP dan Dinas Tenaga Kerja Aceh bisa melakukan konsultasi atau penelitian bersama untuk mengidentifikasi masalah-masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut dan mencari solusi yang tepat.²⁶

Dari hasil wawancara di atas Kerjasama antara FKJP dan Dinas Tenaga Kerja Aceh ini dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi wilayah, dan perlindungan pekerja di Aceh. Langkah-langkah seperti ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan adalah responsif terhadap kebutuhan sektor ketenagakerjaan yang terus berubah.

4.3 Faktor penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam mengurangi pengangguran.

4.3.1 Internal

4.3.1.1 Rendah melibatkan pengusaha / perusahaan (DUDI)

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang menjadi kendala atau menghambat jalannya sebuah kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini

²⁶ wawancara dengan Kepala bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

merupakan kenda – kendala yang di hadapi dalam proses pemagangan masyarakat Aceh.

a. Minimnya dunia usaha dan dunia industri

Kurangnya duni industri di Aceh yang membuat perekonomian ikut melambat. Hal ini juga disebabkan karena penggunaan anggaran oleh pemerintah Aceh tidak tepat sasaran untuk sector – sector yang mampu mendongkrak perekonomian Aceh. seharusnya pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk diprioritaskan pada sector pertanian, dunia usaha, dan sector yang mampu menghasilkan pendapatan daerah. Selain itu juga alasan mengapa industri di Aceh minim yaitu kurang minatnya para pemilik perusahaan mengingat Aceh yang di kenal dengan rawan bencana. Pernah mengalami permasalahan atau konflik politik, serta berada di ujung sumatera

Kepala seksi pemagangan dan produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh memberi pernyataan tentang ini :

Di Aceh kurang adanya industri ya karena pemilik perusahaan kurang minat, mengingat Aceh yang di kenal dengan rawan bencana, pernah mengalami permasalahan atau konflik politik, lalu berada di ujung sumatera yang dianggap jauh gitu”²⁷

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga menambahkan

²⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

kurangnya industri di Aceh banyak sebabnya, bisa jadi karena pemilik perusahaan menganggap Aceh sebagai bekas konflik jadi susah untuk memasukinya bisa juga karena hal lain.”²⁸

Jadi akibat dari konflik politik yang berkepanjangan pada masa lalu membekas hingga Aceh di anggap susah untuk dimasuki dan memiliki banyak aturan untuk mendirikan usaha – usaha besar.

b. Masih kurang konkretnya pelatihan

Pelatihan yang dilaksanakan dianggap kurang konkret dikarenakan perusahaan yang kurang detail memberi kriteria yang ingin dicari, sehingga ketika peserta magang yang dilatih tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan maka tidak dapat dipekerjakan.

perusahaan kadang tidak jelas memberi informasi maunya seperti apa, jadi kadang yang sudah ikut pemagangan pun belum tentu bisa mengerjakan apa yang diminta”²⁹

Peserta magang juga menyampaikan dalam hal ini :

Kita dilatih dalam bidang *front office* di salah satu perhotelan, tiba – tiba ketika akan direkrut ternyata bukan bidang yang diminta oleh perusahaan. Sehingga setelah kami selesai magang kami tidak bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut”³⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan, seharusnya Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh membuat regulasi agar perusahaan yang ingin bekerja sama arau membuat pemagangan untuk menetapkan syarat atau bidan – bidang yang detail untuk program

²⁸ Wawancara dengan kepala bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

²⁹ Wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

³⁰ Wawancara dengan peserta magang pada tanggal 28 September 2023

pemagangan ini, agar program magang ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

c. Etos kerja yang rendah

Dalam era globalisasi, persaingan kerja yang semakin tinggi menuntut setiap orang menguasai keahlian dan kemampuan tertentu untuk menghasilkan daya saing yang tinggi. Keberhasilan dalam persaingan kerja tidak hanya membutuhkan keahlian dan kemampuan saja tetapi juga diperlukan adanya dedikasi, kerja keras, dan kejujuran dalam bekerja.

Sebagian masyarakat Aceh memiliki etos kerja yang rendah, karakter yang kurang baik dan kurangnya minat kerja.

Banyak yang masih pilih – pilih pekerjaan, etos kerjanya tidak ada. Kebanyakan dari mereka gengsi dengan lowongan pekerjaan yang ada, jadi mereka lebih baik tidak melakukan apa – apa daripada bekerja di lowongan yang sudah ada. Padahal sudah ada lowongan tapi tidak mau karena terlalu banyak memikirkan banyak hal seperti gaji, dan lain – lain.³¹

Sebenarnya tidak menjadi masalah jika masyarakat memikirkan masalah gaji atau hal lain dalam memilih pekerjaan, tetapi untuk lulusan baru ada baiknya mencoba dulu suatu pekerjaan tanpa memikirkan hal – hal lain. Lalu masyarakat Aceh terlalu memprioritaskan menjadi ASN, sehingga kurang minat bekerja di perusahaan swasta atau industri lainnya sehingga banyak perusahaan memakai pekerja dari luar yang masuk ke Aceh.

³¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

4.3.1.2 Pelatihan yang dilakukan Kurang melibatkan Institusi DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)

Dalam melaksanakan program pemagangan ini perlu melibatkan institusi DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) . Pemagangan yang melibatkan sector swasta memiliki banyak manfaat dan alasan yang mendasarinya. Melalui pemagangan sector swasta peserta magang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah magang selesai. Banyak perusahaan memilih untuk merekrut mantan peserta magang yang telah merekrut mantan peserta magang yang telah terbukti memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan .

Kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas mengatakan bahwa :

Sebenarnya kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan sektor swasta untuk memperluas lapangan kerja yang ada di Aceh. kadang sector swasta kurang kepercayaan antara pihak – pihak yang terlibat. Dunia Usaha dan Dunia Industri mungkin ragu akan kualitas pelatihan yang diberikan oleh Lembaga pelatihan, sementara Lembaga pelatihan mungkin merasa bahwa industri kurang peduli terhadap perkembangan tenaga kerja di Aceh, oleh karena itu sector swasta memilih merekrut karyawannya sendiri.³²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan keterlibatan institusi Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam pelatihan Dinas tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, penting untuk mempromosikan dialog yang lebih baik antara semua pihak terkait, mengidentifikasi kepentingan Bersama, dan menciptakan insentif untuk berkolaborasi. Ini bisa melibatkan perubahan dalam kebijakan, dukungan

³² Wawancara dengan kepala seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas pada tanggal 18 Agustus 2023

pemerintah, dan kerja sama aktif antara Lembaga pelatihan, industri dan perusahaan, dengan demikian pelatihan tenaga kerja dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

4.3.2 External

4.3.2.1 Rekrutmen Peserta Magang

A. Tahap Persiapan

Dalam mempersiapkan kegiatan pemagangan maka Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan FKJP mengadakan rapat yang membahas substansi antara lain :

- a) Mengevaluasi program pemagangan tahun sebelumnya
- b) Menyusun rencana pelaksanaan pemagangan tahun berjalan
- c) Membentuk panitia pelaksana
- d) Menyusun matrik rencana penyelenggaraan pemagangan dan
- e) Hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemagangan.

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Bersama FKJP melakukan sosialisasi dan publikasi program pemagangan dana dekontribusi kepada perusahaan, Dinas daerah Kabupaten / Kota dan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar informasi program pemagangan dapat diketahui dengan baik oleh masyarakat pencari kerja dan perusahaan – perusahaan yang berada di wilayah daerah provinsi tersebut.

Diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut bersama-sama dengan pemerintah untuk berpartisipasi dalam program pengembangan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pemagangan baik yang dibiayai melalui dana dekontribusi maupun yang dibiayai oleh perusahaan (magang mandiri).

Keuntungan perusahaan apabila menyelenggarakan pemagangan antara lain akan mendapatkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mendapatkan pengurangan pajak (super tax deduction) hingga mencapai 200%. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, brosur, spanduk, poster, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dll) milik Dinas Daerah Provinsi atau perusahaan, atau dalam bentuk rapat koordinasi baik secara daring maupun luring. Biaya sosialisasi dan publikasi bisa menggunakan anggaran Operasional FKJP atau sumber lainnya.

Untuk melaksanakan kegiatan pemagangan maka diperlukan kepanitiaan yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemagangan. Susunan kepanitiaan ditetapkan melalui surat keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas Penduduk Aceh . susunan personil kegiatan pemagangan antara lain :

- a. Penanggung jawab (berasal dari unsur Dinas Daerah Provinsi), mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan
- b. Pelaksana kegiatan (berasal dari unsur Dinas Daerah Provinsi, FKJP dan/atau perusahaan) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan kesekretariatan dan administrasi penyelenggaraan pemagangan.

Kepala bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja menyebutkan bahwa :

Setelah kita melakukan pembentukan panitia pelaksana pemagangan Kita melakukan pendaftaran perusahaan penyelenggara pemagangan, penyelenggara pemagangan harus mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan pemagangan kepada Dinas. Dengan melampirkan dokumen seperti :

- a) Bukti kepemilikan unit pelatihan atau perjanjian kerja sama
- b) Daftar sarana dan sarana prasarana
- c) Daftar nama pembimbing pemagangan
- d) Rencana penyelenggaraan pemagangan
- e) Rancangan perjanjian pemagangan³³

Kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas menambahkan :

Ketika perusahaan penyelenggara pemagangan telah melampirkan dokumen yang di perlukan kita melakukan kurasi, kurasi merupakan suatu proses untuk memilih dan menentukan perusahaan – perusahaan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penyelenggara pemagangan dana dekonstrasi. Kurasi dilakukan oleh panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Perusahaan yang di nyatakan lolos kurasi untuk menyelenggarakan pemagangan , di tetapkan melalui surat keputusan Dinas Provinsi.³⁴

B. Pelaksanaan pemagangan

1. Publikasi

Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemagangan Bersama – sama Dinas Daerah Provinsi dan FKJP untuk mempublikasikan kepada masyarakat tentang program pemagangan yang akan dilaksanakan. Hal – hal yang dipublikasi antara lain :

³³ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

³⁴ Wawancara dengan kepala seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas pada tanggal 18 Agustus 2023

- a. nama program/jabatan pemagangan yang dilaksanakan;
- b. tempat dan durasi pemagangan;
- c. persyaratan peserta pemagangan;
- d. waktu dan cara pendaftaran;
- e. waktu seleksi dan pengumumannya; dan
- f. informasi lain yang diperlukan

2. Rekrutmen dan seleksi peserta

Tata cara rekrutmen dan seleksi peserta magang sebagai berikut :

- a. mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan :
 - 1) Kartu kuning /AK – 1 (kartu pencari kerja) yang di terbitkan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
 - 2) Foto copy kartu tanda penduduk
 - 3) Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- b. Memenuhi syarat – syarat khusus yang di tetapkan oleh perusahaan penyelenggara pemagangan
- c. Mengikuti tahap seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi.

Rekrutmen pemagangan sudah berjalan cukup baik meskipun masih kurang efektif, ada hal – hal yang masih menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pemagangan tersebut. Misalnya pendaftaran yang mengharuskan para calon peserta datang langsung untuk mendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dikarenakan tidak adanya pendaftaran *online*. Padahal tidak semua calon peserta berdomisili di Banda Aceh.

Hal ini disampaikan langsung oleh peserta magang yang berdomisili di Bireun (pendaftar pemagangan).

Pendaftaran cuma bisa datang langsung kesini, tidak bisa online. Jadi ya kadang sehari khusus untuk daftar ini kemudian pulang, baru menunggu hasil di tanggal yang sudah ditetapkan, selain itu informasi mengenai pemagangan dinilai cukup tertutup, saya mendapat informasi ini dari teman saya.³⁵

Namun ada juga calon peserta yang merasa pemagangan ini sudah sangat baik dan berjalan sebagaimana seharusnya. Mereka menilai saat pendaftaran berlangsung, para panitia pemagangan memberi tanggapan dan informasi yang sangat cepat dan tidak bertele – tele.

3. Perjanjian Pemagangan

Calon peserta pemagangan yang dinyatakan lulus seleksi dan dinyatakan sebagai peserta pemagangan, maka peserta pemagangan dan perusahaan menyepakati dan menandatangani surat perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan yang telah ditanda tangani tersebut selanjutnya didaftarkan ke dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan untuk diketahui dan mendapatkan pengesahan oleh Kepala Dinas Provinsi atau kabupaten/kota.

4. Asuransi

Peserta pemagangan berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk asuransi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Premi asuransi dibayarkan sebelum pelaksanaan

³⁵ Wawancara dengan peserta magang pada tanggal 28 September 2023

pemagangan sebagai perlindungan kepada peserta selama mengikuti program pemagangan. Perusahaan harus mengurus kepesertaan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta pemagangan. Biaya asuransi kegiatan pemagangan, pembayaran premi asuransi telah dialokasikan di dalam anggaran dana dekonsentrasi.

5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Selama penyelenggaraan kegiatan pemagangan di perusahaan, maka pihak perusahaan harus menyiapkan kelengkapan K3 kepada peserta pemagangan. Jenis fasilitas K3 tersebut, disesuaikan dengan jenis resiko kerja pada program pemagangan yang dilaksanakan.

Kepala seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja mengatakan bahwa :

semua perusahaan menyiapkan kelengkapan K3, Tergantung perusahaannya apa. Biasanya perusahaan yang resiko kecelakaannya tinggi yang menyiapkan Keselamat dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan adanya K3 ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.³⁶

6. Jangka waktu pemagangan

Program pemagangan dilaksanakan di perusahaan dengan durasi waktu selama 5 bulan. Sebelum melakukan praktik di area produksi, maka pembimbing pemagangan akan memberikan pembekalan pengetahuan teori tentang keselamatan kerja, tata tertib perusahaan, budaya kerja, dan hal – hal teknis yang berkaitan dengan pekerjaan

³⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

sesuai dengan masing – masing program pemagangan. Pemagangan. Pemberian teori ini terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sampai program pemagangan berakhir.

Wawancara dengan peserta magang berkenaan dengan pembekalan pemagangan :

Sebelum kita terjun ke lapangan, kita di beri pembekalan yang di lakukan di dalam kelas (*in class training*). Disini kita di beri pemahaman tentang prosedur perusahaan. Untuk kegiatan praktik, kita terlibat langsung di lapangan sehingga kita dapat langsung melakukan pekerjaan layaknya seorang karyawan.³⁷

Selama melaksanakan pemagangan, para peserta harus mengisi *log book*, yaitu buku yang berisi tentang aktivitas harian yang dilaksanakan oleh peserta magang. Catat log book harus di ketahui dan disetujui oleh pembimbing pemagangan. Contoh *log book* terlampir pada gambar 4.2

³⁷ Wawancara dengan peserta magang pada tanggal 28 September 2023

Lampiran 8
Contoh Format Logbook

BUKU KEGIATAN (LOG BOOK)
PESERTA PEMAGANGAN

NAMA PROGRAM/JABATAN :

NAMA PERUSAHAAN :

NAMA PESERTA :

NAMA PEMBIMBING :

DURASI PEMAGANGAN :

Nama Peserta :
Nama Pembimbing :
Bulan :
Minggu ke- :

NO.	HARI, TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	KOMENTAR PEMBIMBING
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

Catatan:

- Peserta mengisi kegiatan pemagangan setiap hari
- Kolom hasil kerja diisi dengan bukti hasil kerja dapat berupa gambar/foto atau dokumen
- Pembimbing pemagangan melakukan review mingguan atas hasil kerja pesereta pemagangan.

Gambar 4.2 log book peserta pemagangan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2023

Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan program pemagangan, dan dinyatakan kompeten sesuai dengan standar perusahaan oleh Pembimbing Pemagangan akan diberikan Sertifikat Pemagangan. Dan bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten maka akan mendapatkan Surat Keterangan telah mengikuti program pemagangan. Contoh Format Sertifikat Pemagangan dan Surat Keterangan.

Setelah selesai magang di perusahaan, terutama bagi peserta yang memperoleh sertifikat pemagangan agar diupayakan penempatan, baik di perusahaan tempat pemagangan, anak perusahaan atau perusahaan lain yang membutuhkan. Bagi peserta yang mempunyai potensi wirausaha agar perusahaan membantu untuk menjadikan mitra usahanya atau usaha lain yang sejenis. Bagi peserta yang belum dapat ditempatkan agar didaftarkan ke bursa kerja oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Realisasi dari penempatan lulusan ini agar dilaporkan oleh panitia penyelenggara kepada Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

Dunia usaha dan dunia industri yang memberikan fasilitas tempat workplace training dan pemagangan ini dominannya bergerak di bidang produksi, pelayanan jasa dan tata niaga. Untuk jumlah perusahaan yang bekerja sama dari tahun 2020 – 2022 ini terdapat pada tabel 4.1

Tahun	Jumlah
2020	48 Mitra Industri
2021	98 Mitra Industri
2022	42 Mitra Industri

Tabel 4.3.1 Data jumlah mitra program

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2023

Untuk jumlah peserta pemegang yang ditempatkan pada mitra industri bekerja sama dari tadi 2020 – 2022 ini dapat di lihat pada tabel 4.2

Tahun	Jumlah Peserta
2020	150 Orang
2021	310 Orang
2022	380 Orang

Tabel 4.3.2 Data jumlah peserta magang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2023

Peserta magang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada tabel 4.3.1 dapat kita lihat peningkatan jumlah peserta dari tahun 2020 ke tahun sebanyak 105 % dari tahun sebelumnya. Untuk keterserapan dalam dunia kerja setelah *workplace training* dan pemagangan ini dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tahun	Jumlah Pemegang	Terserap Industri	persentase
2020	150 Orang	102 Orang	68%
2021	310 Orang	242 Orang	78%
2022	380 Orang	311 Orang	82%

Tabel 4.3.3 Data jumlah serapan dalam dunia kerja.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2023

Besaran persentase keterserapan peserta magang setelah menjalani program magang di tempat kerja selama 5-6 bulan diatas merupakan hasil pantauan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan

melakukan tracer studi keterserapan terus naik dari sejak program magang di luncurkan.

Kepala bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja mengatakan bahwa :

Jumlah peserta magang dari tahun ke tahun terus meningkat, melalui program magang ini diharapkan akan terciptanya tenaga kerja yang terampil dalam bidangnya, produktif dan mempunyai nilai jual yang baik tingkat nasional maupun internasional.³⁸

Hal tersebut juga disampaikan pemilik unit usaha (Danish car interior mengatakan bahwa :

Setelah 3 bulan mengikuti program magang pada *workshop* Danish Car, para peserta magang terlihat sudah memiliki keterampilan tinggi dalam mendesain, menjahit dan memasang jok dan interior mobil. Program pelatihan dan magang dalam durasi lima bulan ini saya kira efektif dalam menekan pengangguran di Aceh. mereka magang secara full dari pagi hingga sore selama lima bulan. Ini program yang serius bukan main – main.³⁹

4.3.2.2 Diskriminasi

Dalam mengatasi pekerja banyaknya tenaga kerja luar Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai beberapa strategi yang dapat di pertimbangkan. Seperti kerjasama dengan sector swasta Dinas Tenaga kerja dapat berkolaborasi dengan perusahaan swasta untuk menciptakan program – program yang mendukung penggunaan tenaga kerja lokal, ini bisa meliputi insentif pajak atau insentif lainnya bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal atau berinvestasi di Aceh.

³⁸ Wawancara dengan kepala bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

³⁹ Wawancara dengan pemilik unit usaha (Danish Car Interior) pada tanggal 27 Agustus 2023

Seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja mengatakan bahwa :

Perusahaan bukan tidak mau mempekerjakan tenaga kerja lokal, terkadang tenaga kerja lokal ini SDM nya kurang.banyak dan juga tenaga kerja lokal ini kadang kurang disiplin. Oleh karena itu mereka mau merekrut karyawannya secara mandiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, untuk meningkat SDM tenaga kerja lokal ini maka tenaga kerja lokal ini kita latih dulu baik di balai latihan kerja ataupun magang di perusahaan.⁴⁰

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mengambil langkah – langkah untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan penduduk Aceh sehingga mereka memiliki keterampilan yang di butuhkan. Ini dapat membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar Aceh. program pemagangan ini dapat membantu mempersiapkan tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Aceh.

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempromosikan program magang dan tenaga kerja lokal. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mendorong perusahaan untuk mendukung program magang dan memberikan peluang kerja bagi penduduk Aceh dapat membantu mengurangi penggunaan tenaga kerja luar. Ini dilakukan melalui sosialisasi yang mengedukasi perusahaan tentang manfaat penggunaan tenaga kerja lokal.

⁴⁰ Wawancara dengan seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

Kepala Bidang Penempatan Kerja dan pelatihan Tenaga Kerja mengatakan bahwa :

Kompetensi calon tenaga kerja di Aceh ini kompetensinya masih rendah sehingga banyak perusahaan cenderung memakai tenaga kerja luar Aceh. dan pengangguran di Aceh di dominasi oleh usia muda 19 s/d 24 tahun. Yang kami lakukan ialah kerjasama lintas instansi (Pemerintah – DUDI – AKADEMIS – Komunitas), disini kita harus fokus dan lepaskan ego sektoral.⁴¹

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Pelatihan Tenaga kerja bahwa Pentingnya untuk melepaskan ego sektoral dan bekerja secara terpadu dalam kerjasama lintas instansi untuk menciptakan perubahan positif dalam masalah ini. Dengan pendekatan ini, Aceh dapat membangun tenaga kerja yang lebih kompeten dan memberikan peluang yang lebih baik kepada pemuda dalam mencari pekerjaan dan memulai bisnis mereka sendiri.

4.4 Pembahasan penelitian

4.4.1 Pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

4.4.1.1 Koordinasi Bersama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)

Koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan dunia usaha dan dunia industri adalah kunci menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dengan adanya koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dapat berperan dalam memfasilitasi investasi di Aceh dengan

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023

memberikan informasi tentang pasar tenaga kerja loka, kebijakan insentif, dan sumber daya manusia yang tersedia.

Program pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri adalah salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat pencari kerja yang ingin meningkatkan sumber daya manusia mereka. Akan tetapi tidak semua perusahaan yang dapat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, di karenakan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh harus mengidentifikasi kelayakan perusahaan untuk mengikuti program magang ini, untuk memastikan bahwa perusahaan mampu melaksanakan program magang sampai selesai.

Temuan 1

Pada dasarnya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mau bekerja sama dengan perusahaan yang sudah memiliki kelayakan untuk mengikuti program magang. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh memiliki persyaratan bagi penyelenggara pemagangan di Indonesia. Khususnya di Aceh mengacu pada pasal 21, Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.

4.4.2 Kolaborasi

Dalam melaksanakan pemagangan ini Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh berkolaborasi dengan FKJP (Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. FKJP (Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan) adalah organisasi yang bersedia melaksanakan kegiatan pemagangan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Dimana forum komunikasi jejaring pemagangan yang terbentuk tidak berafiliasi politik, agama, sara dan sektor maupun kepentingan pribadi. FKJP dimaksud berada di provinsi, kabupaten/kota.

FKJP merupakan mitra pemerintah dalam memerangi pengangguran melalui program pelatihan dan pemagangan bagi perusahaan swasta baik di Aceh maupun di seluruh tanah air. FKJP berkomitmen untuk melakukan inventarisasi kebutuhan tenaga kerja sesuai permintaan pasar, pelatihan dan pencarian kerja di perusahaan. Hal ini sesuai dengan implementasi peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor PER 22/MEN/IX/2009 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri.

Pembentukan FKJP ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemagangan, meningkatkan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan Lembaga pelatihan kerja dan memperkuat peran tanggung jawab pengusaha dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Temuan 2

Pada dasarnya FKJP ini berperan penting dalam menjalankan program magang, di bentuknya FKJP pada tingkat provinsi dan kabupaten / kota adalah sebagai penyeimbang kebijakan – kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemagangan khususnya pemagangan dalam negeri di perusahaan. Dengan adanya FKJP dapat terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dan perusahaan.

4.4.2 Faktor penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

4.4.2.1 Internal

Dalam melaksanakan program pemagangan tentu ada faktor penghambat. Hal ini merupakan kendala – kendala yang di hadapi dalam proses pemagangan. Kurangnya dunia industri di Aceh membuat perekonomian ikut melambat. Minimnya perusahaan yang masuk ke Aceh mengingat Aceh di kenal dengan dengan rawan bencana. Kemudian pelatihan yang di laksanakan kurang konkret dikarenakan perusahaan yang kurang detail memberi kriteria yang ingin di cari, sehingga ketika peserta magang yang di latih tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan maka tidak dapat di pekerjakan.

Sebagaimana yang kita harapkan dalam pelaksanaan pemagangan yang dilaksanakan seharusnya membuat regulasi agar perusahaan yang ingin bekerja sama atau membuat pemagangan untuk menetapkan syarat atau bidang – bidang yang detail untuk program pemagangan ini, agar program magang ini dapat berjalan efektif dan efisien.

Temuan 3

Secara internal pelaksanaan pemagangan ini ditemui kurang jelasnya informasi yang di berikan perusahaan penyelenggara pemagangan sehingga banyak peserta magang yang di latih tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan.

Persaingan kerja yang semakin tinggi setiap orang menguasai keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan daya saing yang tinggi, keberhasilan dalam persaingan kerja tidak hanya membutuhkan keahlian akan tetapi juga di perlukan etos kerja yang tinggi. Sebagian masyarakat Aceh memiliki etos kerja yang rendah, karakter yang kurang baik dan kurang minat kerja.

Adanya temuan lapangan faktor internal penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. sebagai berikut :

Temuan 4

Banyak masyarakat Aceh yang etos kerjanya rendah, kebanyakan dari mereka tidak mau dengan lowongan pekerjaan yang sudah ada. Padahal sudah ada lowongan tapi tidak mau karena terlalu banyak memikirkan banyak hal seperti gaji dan lain – lain.

4.4.2.2 External

Adapun faktor external yang menghambat proses pelaksanaan program magang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. yaitu rekrutmen peserta magang masih konvensional atau belum tersebar luas di media resmi atau media sosial. Sehingga peserta magang yang berpotensi untuk mengikuti magang tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang program magang karena informasi hanya tersebar secara terbatas atau melalui saluran konvensional. Ini bisa menghambat calon peserta yang

berminat untuk mengikuti program magang. Dengan rekrutmen yang terbatas pada metode konvensional, mungkin sulit untuk mencapai beragam peserta yang berpotensi termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, kelompok minoritas, atau latar belakang ekonomi yang berbeda.

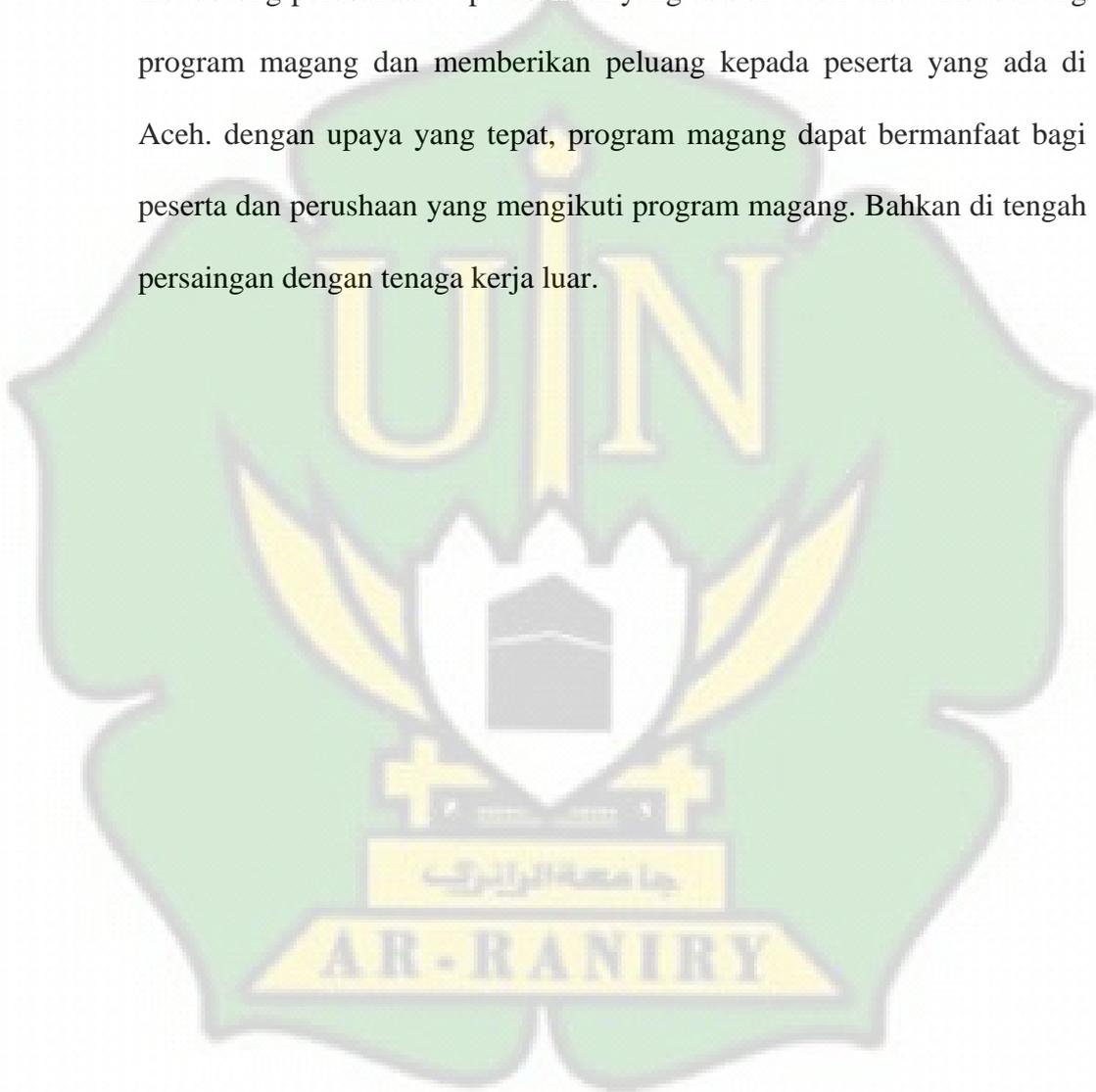
Temuan 5

Untuk mengatasi kendala – kendala ini, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan rekrutmen mereka dengan lebih aktif memanfaatkan media sosial, situs web resmi, dan platform digital. Dengan demikian, program magang mereka dapat menjadi lebih inklusif, efisien, dan mencapai beragam peserta yang berpotensi mengikuti program magang

Faktor external kedua yaitu banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja luar Aceh. jika banyak perusahaan di Aceh lebih suka menggunakan tenaga kerja luar dari Aceh, maka peluang bagi peserta magang lokal untuk mendapatkan pekerjaan atau pengalaman di perusahaan tersebut dapat menjadi terbatas. Perusahaan yang memilih tenaga kerja luar Aceh mungkin tidak memiliki kebutuhan atau minat yang cukup dalam program magang. Ini bisa membuat sulit untuk menemukan perusahaan yang bersedia menjadi mitra dalam program magang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Temuan 6

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh harusnya mendorong perusahaan – perusahaan yang ada di Aceh untuk mendukung program magang dan memberikan peluang kepada peserta yang ada di Aceh. dengan upaya yang tepat, program magang dapat bermanfaat bagi peserta dan perusahaan yang mengikuti program magang. Bahkan di tengah persaingan dengan tenaga kerja luar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemagangan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. program pemagangan ini dikategorikan berhasil karena efektif dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai oleh industri. Persentase serapan hasil program masih perlu dilakukan penelusuran dan dipetakan lebih mendalam berdasarkan outcome yang ingin dicapai. Program magang dalam negeri dan *workplace training* ini secara tidak langsung akan menjadi sarana untuk mempertemukan tenaga kerja yang sesuai permintaan dari dunia industri yang bermitra dengan pemerintah Aceh. Hal ini dapat terjadi karena Pelaksanaan Program Pmagangan dalam Negeri tersebut didukung oleh peserta pelatihan yang tepat sasaran, instruktur pelatihan dan pembimbing pemagangan yang berkompetensi dalam melatih dan membimbing peserta pelatihan pemagangan, waktu yang disediakan untuk memberikan informasi dan materi pelatihan bagi peserta pelatihan dimana materi yang diberikan terdiri dari materi teori dan praktek yang lebih dominan dalam pelatihan kerja dan Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh beserta pihak Pelatihan Kerja serta Perusahaan menyusun berbagai metode atau strategi dalam melatih para peserta pelatihan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. rekrutmen terbatas, kurangnya penyebaran rekrutmen peserta magang secara luas secara konvensional dapat

menghambat kesuksesan program magang. Ini berarti bahwa banyak individu yang berpotensi mendapatkan manfaat dari program magang mungkin tidak memiliki akses atau informasi yang cukup tentang peluang ini. Oleh karena itu langkah – langkah perlu diambil untuk memperluas jaringan rekrutmen dan memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin individu yang berpotensi. Banyak perusahaan menggunakan tenaga kerja luar Aceh ini dapat mempengaruhi tujuan program magang yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Keberhasilan program magang dapat terganggu jika pekerja dari luar Aceh lebih disukai oleh perusahaan. Ini mungkin mengharuskan pemerintah dan perusahaan bekerja sama untuk mempromosikan dan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal, serta memberikan insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan magang yang telah dilatih secara lokal. Dengan demikian, program magang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Aceh dan membantu mengurangi kemiskinan ekstrim dengan menciptakan peluang kerja lokal yang lebih banyak.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dapat memperluas kuota peserta magang dan perusahaan mitra untuk pelaksanaan program ini. Sehingga perlu dilakukan langkah – langkah inovatif sehingga kuota penerimaan peserta magang dapat bertambah setiap tahun.
2. Koordinasi antara Dinas Tenaga dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan berbagai pihak lembaga pelatihan swasta diharapkan dapat terjalin dengan

baik lagi di tahun selanjutnya dan kedua belah pihak tersebut dapat berkoordinasi dengan baik dalam menciptakan inovasi merancang metode dan strategi pelatihan dan pemagangan sehingga hasil yang didapatkan lebih memuaskan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Ahmadi, *Ilmu sosial Dasar*, (Jakarta : Rineka Cipta,2009)

Agus Haryadi, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta
Prenamedia Group, 2015

Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

Akhmad Musyafak. 2015. *Mapping Agroekonomisistem dan Sosial Ekonomi
Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkulu- Serawak
Kalimantan Barat*. (Yogyakarta: Deepublish,)

Irfan Syaki Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2017),

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Riset Komunikasi*. Prenada. Jakarta.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002)

M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya*. Ghalia : Indonesia Bogo

Poerwandari, E.K. (2017). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku
Manusia*. Depok: LPSP3 UI.

Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses dalam
Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Hlm. 34-35

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Erwin Ferdinansyah, Erwin Ferdinansyah, “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri - Dekon 2022,” 2022.

Jurnal Ilmu Ekonomi et al., “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI ACEH,”
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 10, no. 1 (2015): 37.

Muhammad Zulfadhli. 2016. Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Di Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*. Volume 4, Nomor 1

B. Undang - Undang

UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

PERMENAKER Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemagangan

Peraturan Gubernur Aceh 112 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fisip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 715/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara' pada tanggal **09 Maret 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing I

2. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Dirva Qadri

NIM : 190802018

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Program Pemagangan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan Ekstrem Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Menetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 15 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,
MUJI MULIA

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1944/Un. 08/FISIPI/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIRVA QADRI / 190802018**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : JL. T. SAMIDAN, LR. DAHLIA, LAMGLUMPANG, ULEE KARENG,
BANDA ACEH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Program Pemagangan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan Ekstrim Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Oktober 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27 Maret
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3. Surat balasan penelitian



Banda Aceh, 8 November 2023

Nomor : 500.15.6.1/908
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) eks
 Hal : Hasil Penelitian Ilmiah

Yang Terhormat,
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Pemerintahan Universitas
 Islam Negeri Ar-Raniry

di-
 Tempat

1. Sehubungan surat Saudara Nomor : B-1944/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/10/2023, Tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama/NIM : Dirva Qadri
 Semester : IX/Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl. T. Samidan, Lr. Dablia Langlumpang, Ulee Kareng B. Aceh

2. Kami menyampaikan bahwa mahasiswa dengan nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian Ilmiah dan kami telah memberikan dan memfasilitasi data dukung untuk penulisan Skripsi sebagai syarat kelulusan selama melakukan penelitian ilmiah pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
3. Demikian di sampaikan dan terima kasih.

KEPALA BIDANG
 PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA



QIFTI REZA KESUMA, ST
 PENATA TK. I
 NIP. 19750919 200604 1 001

Lampiran 4. Pedoman wawancara

KUISIONER PENELITIAN
PEMAGANGAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN
EKSTRIM PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS
PENDUDUK ACEH

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam mengurangi kemiskinan ekstrim ?

No.	Dimensi	Indikator
1.	koordinasi Bersama dunia usaha dan dunia industri.	a. Musyawarah b. DUDI (dunia usaha dan dunia industri) dan peserta magang membuat perjanjian bersama.
2.	Kolaborasi	a. Kerjasama FKJP b. Komunikasi

2. Faktor penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam mengurangi kemiskinan ekstrim?

No.	Dimensi	Indikator
1.	External	a. Pola rekrutmen b. Banyak perusahaan menggunakan tenaga kerja luar aceh
2.	Internal	a. Pelatihan b. Keterlibatan perusahaan

Fokus 1

A. Koordinasi bersama dunia usaha dan dunia industri

1. Siapa yang melakukan koordinasi dalam musyawarah pelaksanaan pemagangan?
2. Apa yang di lakukan yang di lakukan koordinasi bersama dudi ?
3. Bilamana di lakukan musyawarah untuk membangun kerjasama dalam koordinasi dunia usaha dan dunia indsutri?
4. Dimana di lakukan koordinasi untuk di lakukan musyawarah bersama dunia usaha dunia industri pada pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.?
5. Bagaimana koordinasi bersama dudi?

B. Kolaborasi

1. Siapa yang terlibat kerjasama fkjp pada di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh?
2. Apa kerjasama yang di lakukan dalam kolaborasi bersama FKJP?
3. Bilamana di lakukan kerjasama bersama fkjp dengan membangun komunikasi?
4. Dimana di lakukan kerjasama antar FKJP dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh?
5. Bagaimana kerjasama yang di bangun untuk program magang yang sudah di rencanakan.?

Fokus 2

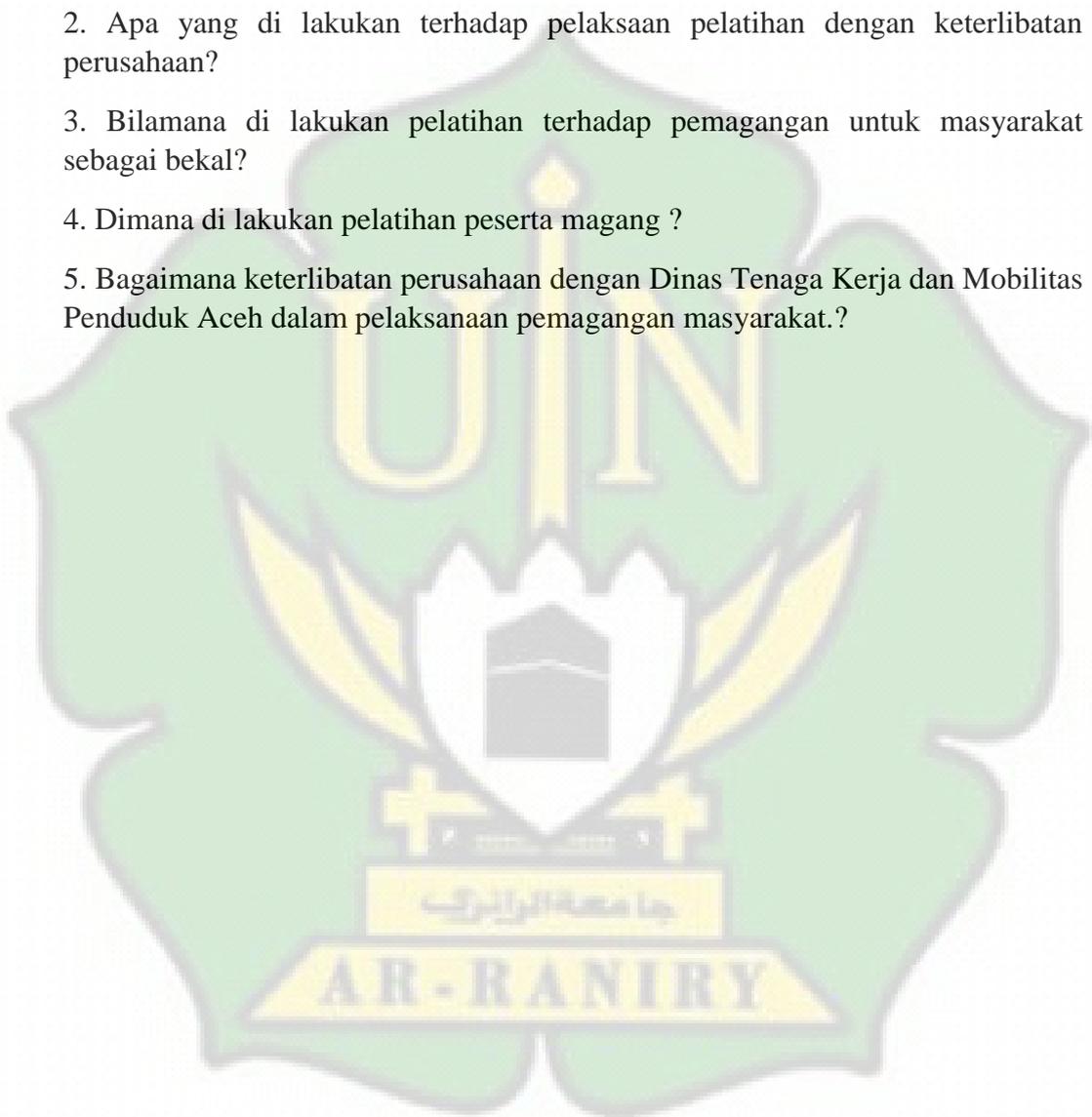
A. External

1. Siapa yang menentukan pola rekrutmen program magang pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh?
2. Apa yang di peroleh dari hasil pemagangan?
3. Bilamana di lakukan rekrutmen pemagangan oleh perusahaan perusahaan yang sering di gunakan tenaga luar aceh?
4. Dimana di lakukan rekrutmen pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh?

5 bagaimana pola rekrutmen yang di canangkan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh?

B. Internal

1. Siapa yang melakukan pelatihan terhadap peserta magang?
2. Apa yang di lakukan terhadap pelaksanaan pelatihan dengan keterlibatan perusahaan?
3. Bilamana di lakukan pelatihan terhadap pemagangan untuk masyarakat sebagai bekal?
4. Dimana di lakukan pelatihan peserta magang ?
5. Bagaimana keterlibatan perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam pelaksanaan pemagangan masyarakat.?



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja



Wawancara dengan Kepala Seksi Pemagangan Dan Peningkatan Produktivitas



Wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Kerja Dan Perluasan Tenaga Kerja



Observasi pelaksanaan tes tulis peserta magang di SMK 2 Banda Aceh



